

Nama : Bagus Utomo

NPM : 2512120055

Kelas : 2 Ak 1

Matakul : Akuntansi publik

kelompok 5.

Jenis " Anggaran Sektor Publik

* Perkembangan anggaran Sektor publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yg digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yg muncul di masyarakat.

* Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yg banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini, terdapat 2 ciri utama dalam pendekatan ini yaitu:

- a. Cara penyusunan anggaran yg didasarkan atas pendekatan incremental dan
- b. Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line item.

Kelemahan anggaran tradisional :

- a. Hubungan yg tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan
- b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh.
- c. Lebih berorientasi pada input daripada output
- d. Anggaran tradisional bersifat tahunan
- e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan modal.

* Anggaran publik dengan pendekatan NPM (New public management)

Era ini berfokus pada kinerja organisasi, bukan pada kebijakan:

1. Pemerintah katalis : sebagai pemberi arahan
2. Pemerintah milik masyarakat : memberikan wewenang kepada masyarakat
3. Pemerintah wirausaha : mengembangkan pusat pendapatan
4. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati
5. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan kerja tim.

* Perubahan pendekatan anggaran

Pendekatan baru dalam sistem kinerja (performance budgeting), Zero-based budgeting (ZBB), Planning, programming, and budgeting system (PPBS) anggaran tersebut memiliki karakteristik umum:

1. Komprehensif/komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yg rasional
4. Analisis total cost dan benefit
5. Adanya pengawasan kinerja.

* A. Anggaran kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja.

B. Zero - Based Budgeting (ZBB)

Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan incremental dan line item karena anggaran mulai diasumsikan dari nol (zero).

- Proses implementasi ZBB:
 - Identifikasi unit "keputusan"
 - Penentuan paket "keputusan"
 - memeringkat dan mengevaluasi paket keputusan

C. Keunggulan ZBB

- ZBB berfokus pada value for money
- meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf manager
- meningkatkan partisipasi manajemen level bawah.

D. Kelemahan ZBB

- Proses memakan waktu
- ZBB cenderung menekankan manfaat jangka panjang
- Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yg maju.

E. Planning, programming and budgeting system (PPBS)

PPBS merupakan teknik penganggaran yg didasarkan pada teori sistem yg berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

F. Proses implementasi PBSS

- Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas
- Pemilihan program yg memiliki manfaat besar dengan biaya yg kecil
- Alokasi sumber daya ke masing-masing program yg di setujui

G. kelebihan PBSS

- Dalam jangka panjang dapat meringankan beban kerja
- Menghindarkan program yg overlapping
- PBSS menggunakan teori marginal utility.

H. kelemahan PBSS

- PBSS bagus secara teori tetapi sulit untuk diimplementasikan
- PBSS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi
- PBSS merupakan teknik anggaran yg statistically oriented.

I. Masalah utama penggunaan ZBB dan PBSS

- Pelaksanaan teknik menimbulkan beban pekerjaan yg sangat berat
- Kesulitan dalam penentuan program dan tujuan
- Seringkali tidak memungkinkan melakukan perubahan cepat dan tepat
- Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yg besar
- Pemerintah beroperasi dalam dunia yg tidak rasional.

5. Pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia

Pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan terhadap hak dan kewajiban negara / daerah yg bernilai uang diatur dalam UU No 17 tahun 2003 dan PP No 12 tahun 2019. Prinsip utamanya adalah tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Berikut adalah poin-poin penting materi pengelolaan keuangan negara dan daerah:

1. Dasar hukum utama
2. Ruang lingkup dan pengelola
3. Struktur pengelolaan keuangan
4. Sumber pendapatan
5. Asas pengelolaan keuangan daerah.